



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 27/ORI-MOU/IV/2019**

**NOMOR : 100/629/Pem**

**TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN  
PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT**

Pada hari ini tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Makassar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof.AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D.** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama ombudsman Republik Indonesia, Berkedudukan di jalan HR.Rasuna Said Kav C-19 Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. H. SYAMSARI, S.Pt. M.M.** : Selaku Bupati Takalar, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131-73-8550 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Takalar, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- d. Pertukaran informasi/data.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Sekretaris Daerah di

lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

#### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

#### **BAB V**

#### **KERAHASIAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi /data yang di terima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan pengguna informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan Pejabat Penghubung di tetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepahaman.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan (*addendum*) Nota Kesepahaman Ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU,**

**Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., L.M., Ph.D**



**PIHAK KEDUA,**

**H. SYAMSARI, S.Pt., MM**